



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAHMI FADLI
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 531028

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.106.530.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
3. Bangunan Seluas 38 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
4. Tanah Seluas 4963 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 99.260.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 462 m2/438 m2 di KAB / KOTA PASER, Rp. 657.270.000		
6. Tanah Seluas 450000 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	1.285.000.000
1. MOBIL, MERCEDES-BENZ C 300 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 435.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	285.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	470.532.036



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 7.147.062.036

III. HUTANG

Rp. 495.884.913

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.651.177.123

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.